

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kriteria mana yang paling penting dengan kebijakan perumahan serta mengetahui apakah kebijakan sudah sesuai dengan kriteria kebijakan perumahan. Objek penelitian ini menggunakan 3 dokumen yaitu Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039, dan dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2038. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan yaitu *Deplhic Hierarchy Process* (DHP) untuk mengukur hasil evaluasi kebijakan. Metode ini merupakan gabungan dari metode Delphi dan teknik *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

Berdasarkan tujuan penelitian bahwa kesimpulan dari hasil penilaian kriteria evaluasi diketahui bahwa sub kriteria yang paling penting merupakan koordinasi yang merupakan bagian dari kriteria kelembagaan. Bahwasannya koordinasi merupakan salah satu kriteria untuk menciptakan *good governments*. Para pakar/ahli sepakat bahwa tanpa adanya koordinasi, tujuan kebijakan perumahan tidak akan dapat berjalan, karena hal tersebut merupakan faktor utama sebagai jembatan agar para *stakeholder* dapat memiliki pandangan dan tujuan yang sama dalam melaksanakan kebijakan perumahan.

Kesimpulan dari 3 (substansi) berupa program RTLH mulai dari tingkat Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang telah dievaluasi, tidak terdapat program yang memenuhi 9 kriteria evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria *housing policy*. Hal tersebut menggambarkan bahwa Perkotaan Kedungwuni belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang mempertimbangkan kriteria *housing policy*. Meskipun demikian sudah terdapat satu program yang memenuhi 8 kriteria yaitu program RTLH tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil keterkaitan program dengan kriteria evaluasi diketahui bahwa tidak ada keterkaitan dengan kriteria sistem Bankeu. Artinya dalam substansi kebijakan sudah dilaksanakannya semua kriteria yang ada kecuali sistem Bankeu. Selain itu penilaian pada Program RTLH tingkat Provinsi dinilai memiliki prioritas tinggi kedua, Berdasarkan hasil keterkaitan program terdapat 7 kriteria yang berkaitan dengan substansi kebijakan atau sudah dilaksanakan kecuali sistem Bansos dan sistem Pasar belum dilaksanakan. Sedangkan untuk Program BSPS Tingkat Pusat memiliki kriteria tingkat rendah. Berdasarkan hasil keterkaitan program dengan kriteria evaluasi pada program RTLH Pusat bahwa sistem Bansos dan sistem Pasar belum dilaksanakan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat rekomendasi yang dapat diberikan untuk pemerintah selaku pembuat sekaligus pelaksana kebijakan perumahan di Perkotaan Kedungwuni untuk meningkatkan pelaksanaan program RTLH. Berikut merupakan penjabaran dari rekomendasi tersebut.

- a. Pada substansi kebijakan prioritas tinggi terkait dengan program RTLH tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Perkotaan Kedungwuni sudah memenuhi 8 kriteria dari 9 kriteria. Hal tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan agar kebijakan perumahan di Kedungwuni tetap sesuai dengan kriteria kebijakan perumahan. yaitu program RTLH tingkat Kabupaten harus dipertahankan supaya tetap sesuai
- b. Pada substansi kebijakan level Provinsi terdapat 7 kriteria dari 9 kriteria yang berkaitan dengan substansi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Meskipun kebijakan RTLH provinsi dalam kategori prioritas tertinggi kedua namun perlu adanya penambahan bantuan sosial dan bantuan dana dalam bentuk CSR untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.
- c. Substansi kebijakan dengan kategori terendah yaitu program BSPS level Pusat, hal ini meskipun sudah memenuhi 7 kriteria dari 9 kriteria, namun agar program dapat berjalan maksimal perlu adanya penambahan bantuan keuangan dan juga bantuan dana dari perusahaan (CSR) terkait dengan memprioritaskan Desa Podo, karena memiliki jumlah RTLH terbanyak di perkotaan Kedungwuni.
- d. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan data yaitu hanya fokus pada penelitian program RTLH, maka penelitian lanjutan yang diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini yaitu dengan mengkaji semua kebijakan perumahan yang ada di perkotaan kedungwuni karena pada penelitian ini sudah menggunakan kriteria *housing policy*.